



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# STRATEGI PENGELOLAAN UTANG JANGKA MENENGAH 2023-2026

djppr

Keputusan Menteri Keuangan  
KMK-381/KMK.08/2022

# STRATEGI PENGELOLAAN UTANG JANGKA MENENGAH



## Ruang Lingkup

- 1) Pengelolaan pembiayaan APBN melalui utang yang terdiri dari pengelolaan surat berharga negara (SBN) dan pinjaman
- 2) Pengelolaan kewajiban penjaminan Pemerintah

## Tujuan

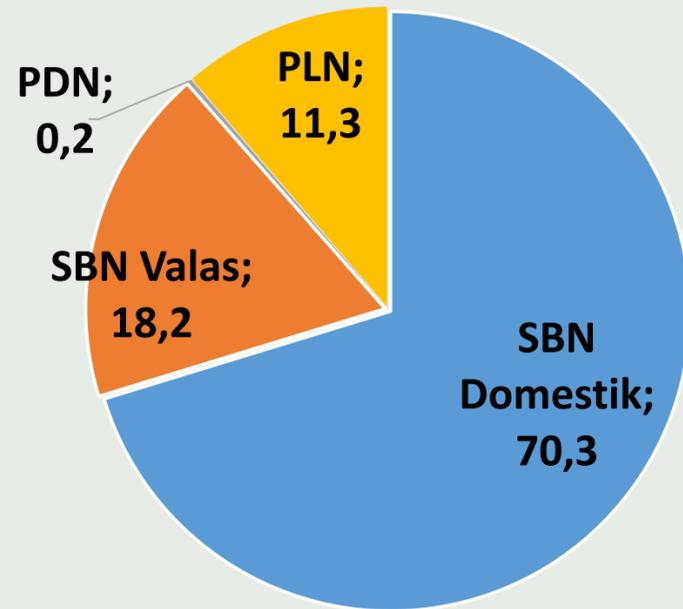
- 1) Memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal dan risiko yang terkendali
  - >> termasuk: mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif dengan tetap memperhatikan keberlangsungan fiskal; dan
- 2) Mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid

## Evaluasi

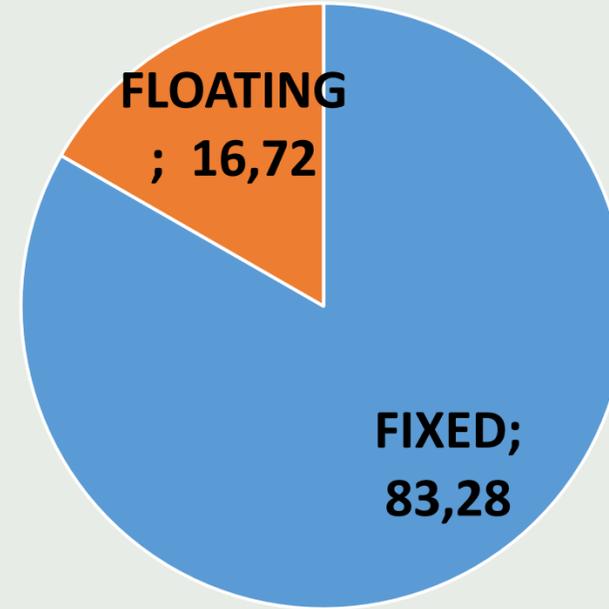
- 1) Dilaksanakan secara periodik minimum 6 bulan setelah implementasi SPUJM
- 2) Hal-hal yang dipantau: progres implementasi kebijakan kualitatif & pembaruan target kuantitatif dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi, fiskal serta pasar keuangan

# PORTOFOLIO UTANG PEMERINTAH PUSAT\*)

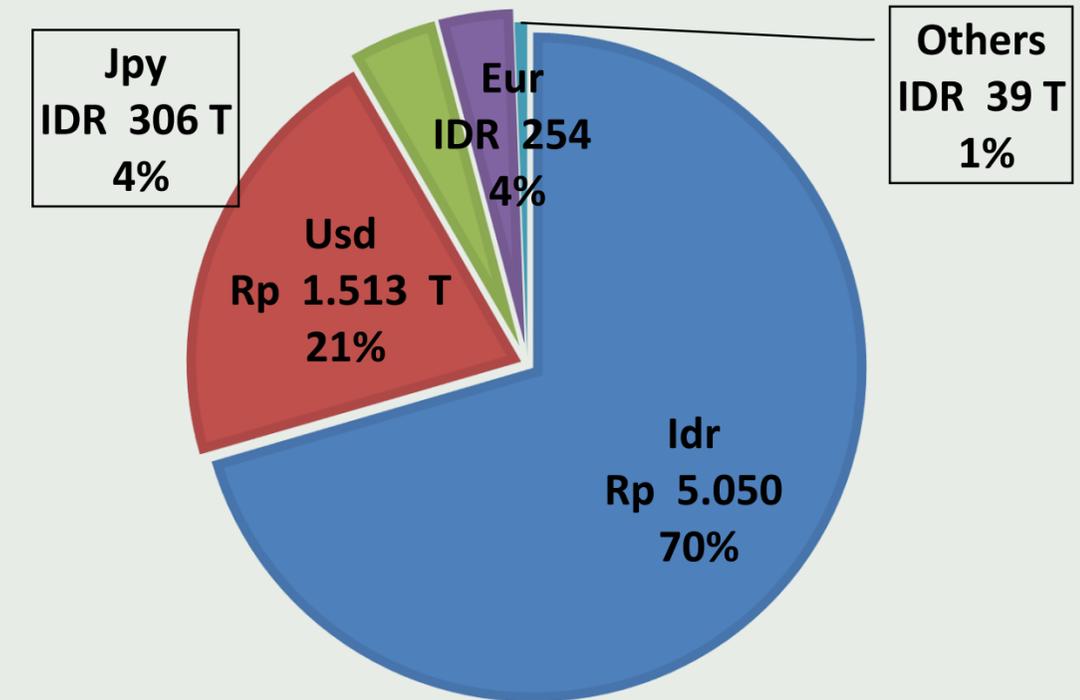
Berdasarkan Instrumen



Berdasarkan Tingkat Bunga

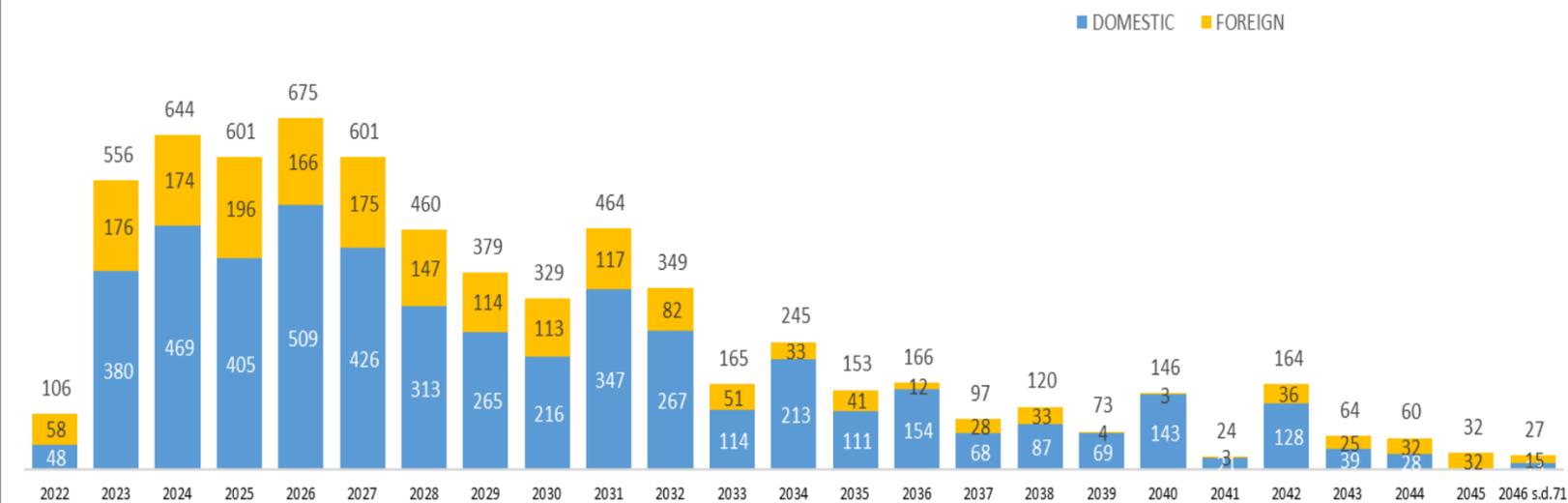


Berdasarkan Mata Uang

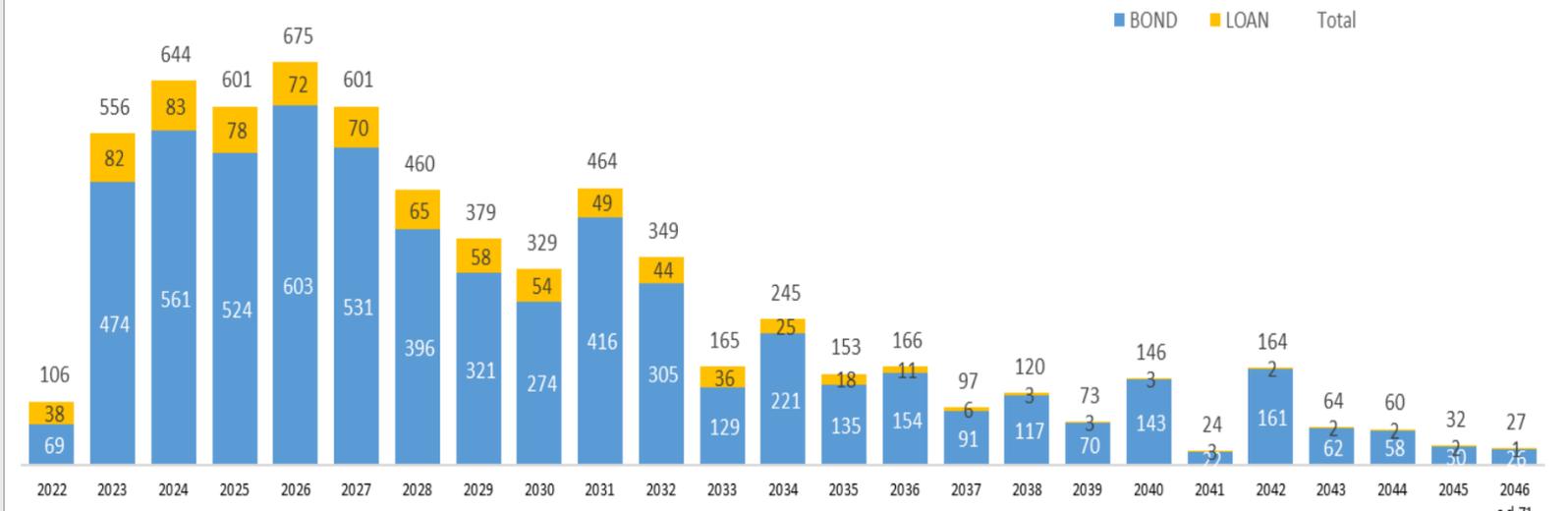


\*) Berdasarkan data utang per 31 Juli 2022, outstanding Rp 7.163,1 T

Profil Jatuh Tempo  
Berdasarkan Jenis Mata Uang (triliun Rp)

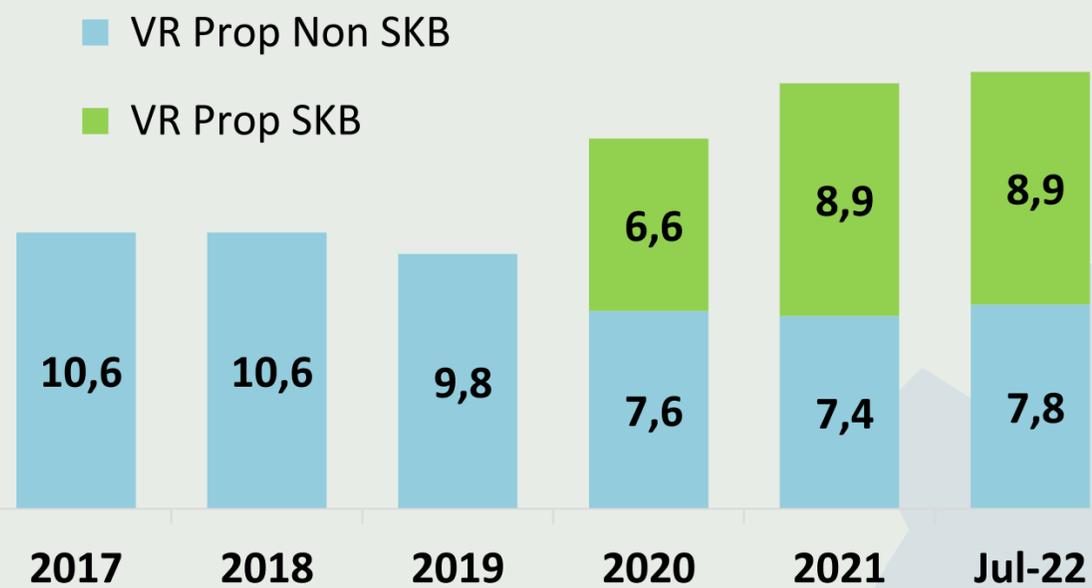


Profil Jatuh Tempo  
Berdasarkan Instrumen (triliun Rp)

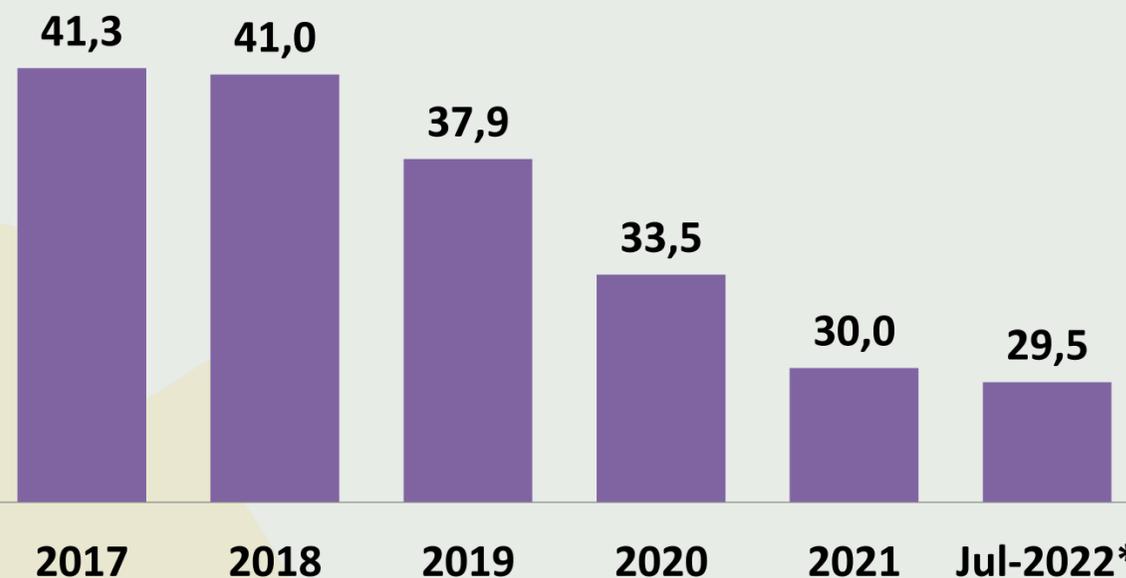




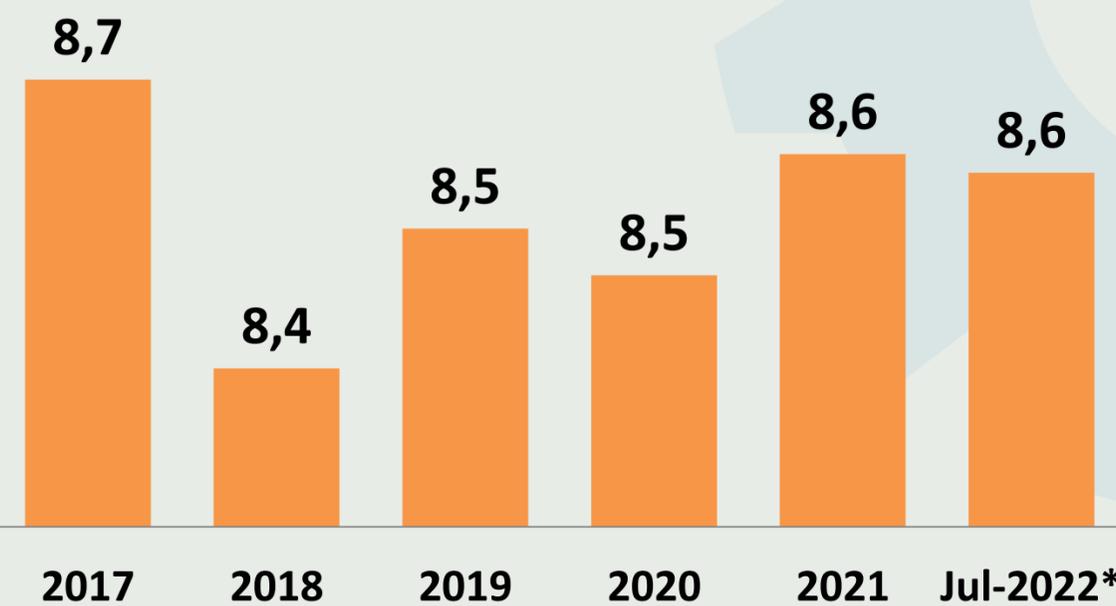
### Risiko Tingkat Bunga (%)



### Risiko Nilai Tukar (%)



### Average Time to Maturity (ATM - Tahun)



### Utang jatuh Tempo (%)



PERKEMBANGAN  
INDIKATOR  
RISIKO\*)



## ASUMSI PROYEKSI JANGKA MENENGAH: TINGKAT BUNGA DAN NILAI TUKAR

### Tingkat Bunga Variabel Pinjaman

Alternative Reference Rate (ARR) USD LIBOR, ARR JPY LIBOR, EURIBOR, dan JIBOR dilakukan melalui **model Cox, Ingersoll, dan Ross (CIR)**

### Tingkat Bunga Tetap untuk SBN

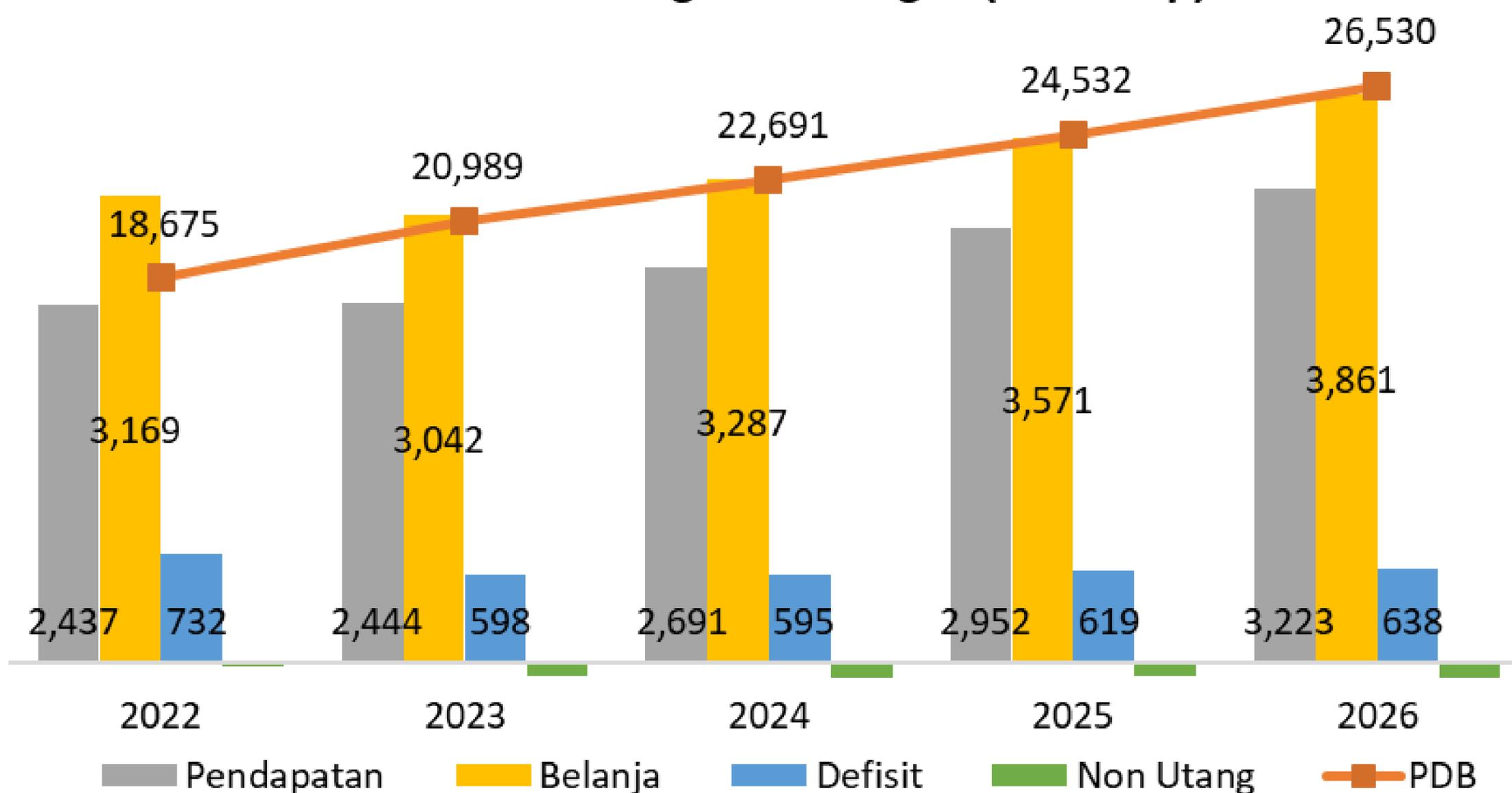
Using Diebold-Li model

### Nilai Tukar

kerangka APBN Jangka Menengah  
2023-2026

# ASUMSI MAKRO DAN FISKAL JANGKA MENENGAH APBN 2023-2026

Asumsi APBN Jangka Menengah (Triliun Rp)



Kebijakan fiskal Pemerintah masih bersifat ekspansif dengan APBN defisit, namun dalam batas aman dan diupayakan cenderung menurun secara persentase terhadap PDB

\* MTFF – BKF per Agustus 2022 (Titik Tengah)



# KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN UTANG



Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dengan memperhatikan dinamika perekonomian dan pasar keuangan melalui pengelolaan yang *prudent*



Mengoptimalkan sumber pembiayaan **domestik**, dan luar negeri sebagai pelengkap



Mengembangkan instrumen utang dengan memperhatikan biaya minimal & risiko yang terkendali, serta kebutuhan pasar



Perluasan basis **investor** melalui edukasi dan literasi keuangan serta pemanfaatan basis data investor



Pemanfaatan **lindung nilai dan/atau liabilities management** utk mengendalikan risiko utang dan/atau mencapai portofolio utang optimum



Koordinasi pengelolaan risiko utang dalam **kerangka pengelolaan Risiko Keuangan Negara**



Mendukung pembiayaan pembangunan dan/atau Program PEN melalui **pemberian penjaminan** memperhatikan risiko fiskal



Pengembangan **pembiayaan kreatif** melalui *blended* financing dan pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan non utang



**Transparansi** pengelolaan utang dan kewajiban penjaminan melalui penerbitan informasi publik secara berkala

# KEBIJAKAN PENGELOLAAN UTANG PER INSTRUMEN (1)

## Kebijakan Pengelolaan SBN

### Sisi Penawaran

1. memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik;
2. menerbitkan SBN valas sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang kuat (*hard currency*);
3. mengelola portofolio SBN secara aktif dan terjadwal; dan
4. melakukan diversifikasi instrumen SBN

### Sisi Permintaan

1. melakukan optimalisasi peran dan kapasitas mitra penjualan SBN di pasar perdana
2. Partisipasi aktif pengembangan ETP dan peran pemerintah di market surveillance
3. Melanjutkan penyempurnaan protokol manajemen krisis & BSF
4. Melakukan penyempurnaan aturan mengenai SLF
5. Pengembangan infrastruktur transaksi *online*

### Sisi Infrastruktur

1. melakukan penyusunan dan harmonisasi strategi komunikasi, edukasi dan sosialisasi, serta program kerja sama kelembagaan dan literasi keuangan
2. Membangun sinergi dengan dunia akademik dan stakeholder lainnya
3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan lainnya

# KEBIJAKAN PENGELOLAAN UTANG PER INSTRUMEN (1)

## Kebijakan Pengelolaan Pinjaman

### Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan

1. Penguatan koordinasi KEMENKEU, BAPPENAS, K/L, serta dapat melibatkan pemberi pinjaman untuk meningkatkan kualitas persiapan proyek;
2. Penguatan sinergi melalui Monev dan implementasi *reward and punishment*
3. Pembatalan pinjaman kegiatan/proyek yang memiliki kinerja buruk

### Perluasan Manfaat Pinjaman Kegiatan

1. Mendukung pembangunan nasional
2. Mendukung pembangunan infrastruktur bersifat fisik, ketahanan dan kemandirian energi, produk teknologi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dan pertahanan keamanan;
3. Mendukung penggunaan B/J produksi dalam negeri, mempertimbangkan TKDN dan transfer teknologi

### Optimalisasi Pinjaman Tunai, mempertimbangkan

1. Kapasitas, dan development goal dari *lenders*;
2. ketersediaan *policy matrix*;
3. Mata uang yang dibutuhkan kas negara;
4. target biaya dan risiko pinjaman

### Pengelolaan portofolio PLN memperhatikan

1. target komposisi portofolio utang
2. struktur produk pinjaman



Batas Maksimum Penjaminan Pemerintah ditetapkan sebesar maksimal **1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap PDB** untuk penerbitan penjaminan baru periode tahun 2023-2026



**PENJAMINAN  
PEMERINTAH**



Penerbitan penjaminan baru dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 diperkirakan hingga mencapai Rp 1.421,13 triliun



## Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.08/2022 tentang Pengelolaan Penjaminan Pemerintah



### Tujuan dari Pengelolaan Penjaminan Pemerintah:

1. Melakukan perhitungan batas maksimal penjaminan;
2. Menilai risiko penjaminan yang dapat berpotensi membebani APBN;
3. Memantau dan memitigasi risiko penjaminan pemerintah; dan
4. Memastikan akurasi dan kelengkapan dari data dalam rangka pelaporan dan akuntansi.



**Ruang lingkup penerbitan penjaminan** adalah proyek atau program strategis Pemerintah mencakup infrastruktur maupun non infrastruktur





# TARGET KUANTITATIF 2023-2026

## Komposisi Utang Baru

Rp : **Minimum** 75,0%

Tingkat Bunga tetap : **Minimum** 80,0%

Periode Menengah-Panjang (>3y):  
**Minimum** 65,0%

\*) komposisi diperkenankan berbeda target pengadaan, pada kondisi khusus:

- a. defisit melampaui target APBN;
- b. kegagalan lelang;
- c. gejolak di pasar SBN;
- d. kebutuhan pembayaran klaim kewajiban penjaminan dengan nilai yang signifikan dan tidak dapat dipenuhi dari dana cadangan penjaminan;
- e. percepatan penarikan pinjaman dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan nasional, dan/atau
- f. keadaan-keadaan darurat yang berpotensi mengakibatkan rencana pembiayaan terganggu

## TARGET INDIKATOR RISIKO\*)

Utang Valas terhadap Total  
*Outstanding* (%)

**Maksimum 30,0%**

Utang tingkat bunga Variabel terhadap  
Total *Outstanding* (%)

**Maksimum 20,0%**

Utang Jatuh Tempo < 1 tahun terhadap  
Total *Outstanding* (%)

**Maksimum 12,5%**

*Average Time to Maturity/ATM* (year)

**Minimum 7,0 years**

## INDIKATOR BIAYA YANG DIMONITOR\*)

Utang terhadap PDB (%)

**Kisaran 40%**

Pembayaran Bunga terhadap PDB (%)

**Kisaran 3%**

\*) ditetapkan dalam *trajectory* sama untuk tiap tahun hingga tahun 2026 dan telah mengakomodasi potensi shock nilai tukar



# *Terima Kasih*

